BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu jantung perekonomian suatu negara, dimana perbankan memiliki peran aktif sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor dengan pihak lain yang membutuhkan pendanaan. Hal ini menegaskan bahwa peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Seperti di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Pada negara berkembang, bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana melainkan tersedianya pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU No 10 tahun 1998

disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.[1]

Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.[2] Sehingga bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional. Peran penting tersebut dapat dilihat dalam fungsi bank yang dasar utamanya berupa kepercayaan (*agent of trust*), lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (*agent of development and agent of services*).

Untuk menghindari operasional bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.[3] Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan

---

[1]http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses pada 30 Juni 2015

[2]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30

[3]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 14

memainkan kegiatan investasi di masyarakat. Di satu sisi (*pasiva atau liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (*aktiva atau aset*) bank syariah aktiv untuk melakukan investasi di masyarakat. Selanjutnya dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan hadis Rasulullah SAW.[4] Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa angin segar bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Lebih dari itu, bank syariah juga membuka peluang memperoleh keuntungan pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Hal ini terbukti ketika krisis pertengahan tahun 1997, saat perbankan nasional tengah terjangkit virus *negative spread* dimana terjadi kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit tetapi bank syariah dengan prinsip bagi hasil justru beroperasi seperti biasa bahkan terlihat tanpa beban.

---

[4]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29

Banyak diantara bank-bank konvensional yang kelimpungan tercekik oleh tingginya bunga karena harus membayar bunga simpanan masyarakat dengan bunga yang selangit, sementara bank tidak bisa menarik bunga kredit sebesar itu dari para nasabah. Sampai pada titik dimana mulai tumbangnya satu persatu bank-bank konvensional karena kesulitan likuiditas dan semakin parah ketika kredit yang telah dikucurkan kepada para debitur banyak yang macet sehingga bank pun kolaps.

Tidak cukup itu saja, kredit macet atau pembiayaan bermasalah *(Non Performing Finance*) ditarik oleh pemerintah dan kemudian dialihkan ke badan penyehatan perbankan nasional (BPPN). Pembukuan merekapun menjadi 'putih bersih' seolah tidak ada noda kredit macet lagi.[5] Keadaan tersebut setelah lima tahun berjalan ternyata masih belum bisa memberikan suatu hal yang berarti bagi kesehatan bank. Sedikitnya ada lima bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebobolan membiayai dana deposan yang cukup mahal, sementara perolehan bunga baik kredit maupun SBI relatif minim.

Begitu juga bank Syariah, meski bank-bank syariah tidak terkena virus *negative spread*, namun tetap tidak banyak memberikan pertolongan pada citra perbankan nasional. Kontribusi perbankan syariah masih sangat kecil sehingga bisa dijadikan maklum atas kondisi diatas. Tetapi bukan berati bank syariah tidak melakukan suatu hal yang berarti bagi perekonomian. Dengan bukti yang dihadirkan oleh bank syariah,

---

[5]M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 48

menjadikan masyarakat Indonesia yang notabene adalah muslim beralih memilih bank syariah sebagai lembaga keungan yang mampu membawa perubahan pada dunia perekonomian. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Dari grafik 1.1 yang tersaji dibawah dapat teranalisis mengenai perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 2004-2014 sangat fluktuatif namun begitu secara keseluruhan memiliki tren yang positif. Pada akhir tahun 2004 inflasi di Indonesia sebesar 6,40 persen.

Berdasarkan data statistik yang di peroleh dari Bank Central Indonesia (BI) bahwa perkembangan laju inflasi mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, meningkat menjadi 11,06% persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,40 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya inflasi pada tahun 2004. Pada akhir tahun 2004 tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera. Sehingga ini merupakan musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia karena kerusakan yang ditimbulkan amat parah oleh bencana tersebut.

Grafik 1.1
Perkembangan Laju Inflasi Di IndonesiaTahun 2004 - 2014

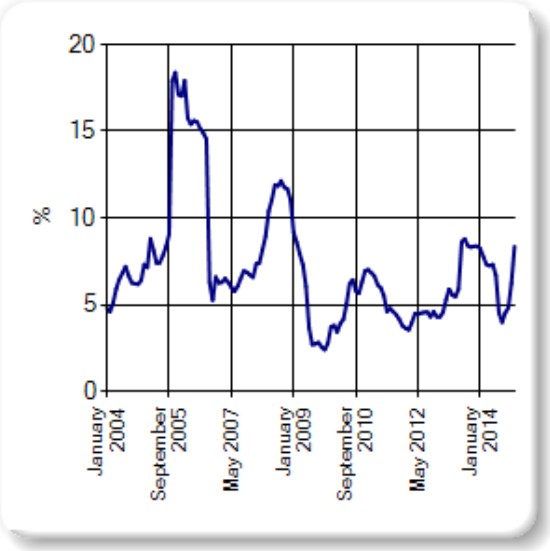

Sumber: Bank Indonesia (diolah).[6]

Selanjutnya inflasi di tahun 2005 juga masih sangat berkaitan erat dengan inflasi yang terjadi di tahun 2004. Inflasi ada tahun 2005 menjadi 17,11 persen, yang kemudian pada tahun 2006 laju inflasi menjadi 6,60 persen. Sama halnya pada tahun 2006, pada tahun 2007 laju inflasi masih stagnan di posisi 6,59 persen, ini membuktikan pada tahun tersebut perekonomian indonesia dalam kondisi stabil. Pada tahun 2008 kondisi ekonomi global mengalami goncang krisis, yang berawal ketika Amerika serikat gagal mengelola usaha properti, sehingga berdampak terhadap laju inflasi dalam negeri yang meningkat mencapai 11,06 persen.

Goncangan krisis tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia yang mendorong dikeluarkannya kebijakan subsidi harga BBM. Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi global yang tinggi. Namun

[6]http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx, diakses pada 10 Mei 2015

inflasi berangsur menurun di akhir tahun 2008 karena harga komoditi yang menurun dan penurunan harga subsidi BBM.

Tahun 2009 kondisi perekonomian dunia dan khususnya Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dengan menurunnya laju inflasi ke 2,78 persen dan pada tahun 2010 laju inflasi Indonesia melonjak mencapai 6,96 persen, hal ini menunjukan telah terjadi kembali krisis perekonomian. Penyebabnya adalah krisis ekonomi di eropa dan berpengaruh pada perekonomian global, kondisi ini sangat berdampak terhadap negara-negara berkembang salah satunya Indonesia yang sangat bergantung pada lembaga bank dunia dan IMF. Berlanjut pada tahun 2011 laju inflasi mulai menurun dari tahun sebelumnya yakni 3,79 persen. Indonesia berhasil mengantisipasi krisis ekonomi yang terjadi di dunia dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil.

Kemudian tahun 2012 laju inflasi mengalami kenaikan setingkat menjadi 4,30 persen, tahun 2013 peningkatan inflasi makin tajam yakni 8,38 persen dan kembali stagnan pada tahun 2014 yakni 8,63 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Selain itu juga disebabkan terganggunya distribusi bahan pangan sebagai dampak dari terpaan banjir sejumlah wilayah di Indonesia, merupakan faktor utama pemicu inflasi pada Januari 2014. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM yang terjadi pada

bulan Oktober. Meskipun tingkat inflasi 2014 meleset dari target, namun jika dilihat lebih jauh nilai tersebut masih sedikit lebih rendah dibanding inflasi tahun 2013 sebesar 8,38 persen. Hal ini perlu diapresiasi dengan baik, mengingat selama 2 tahun berturut-turut terjadi kenaikan harga BBM.

Fluktuasi inflasi diatas tentu sangat mempengaruhi *Non Performing Financing* Bank Syariah utamanya PT Bank Syariah Mandiri. Rentannya gejolak nilai tukar uang disebakan oleh pinjaman yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lain atau masyarakat dalam valuta asing dalam jumlah yang besar. Penurunan rupiah terhadap valuta asing menyebabkan pinjaman dalam mata uang asing meningkat nilainya secara relatif sesuai dengan penurunan tersebut. Peningkatan jumlah kewajiban tersebut berdampak pada kemampuan membayar kewaji banyang semakin menurun, bahkan banyak kasus mengakibatkan ketidak mampuan membayar dan meningkatkan besaran *Non Performing Financing*.

Selain itu, secara lebih umum berfluktuasinya inflasi dari tahun 2004-2014 jelas memberikan pengaruh yang besar pada pertumbuhan bank syariah. Pertumbuhan tersebut menunjukan arah peningkatan. Pada grafik 1.2 menunjukan perkembangan bank syariah berdasarkan statistik perbankan syariah, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 2004 berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia hanya ada 2 Bank Umum Syariah, 10 Unit Usaha Syariah, dan 89 Bank

Perkreditan Rakyat Syariah. Maka pada Oktober 2014 jumlah bank syariah 34 unit yang terdiri dari dari 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 163 unit dan yang menjadi perhatian khusus adalah Bank Syariah Mandiri tercatat memiliki jaringan kantor cabang sejumlah 137 buah, kantor cabang pembantu sejumlah 510 buah dan kantor kas sebanyak 65 buah. Hal ini layak untuk diperhitungkan sebagai salah satu perbankan yang ikut mendorong kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan kemajuan yang pesat.

Grafikl 1.2
Perkembangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2004 –2014

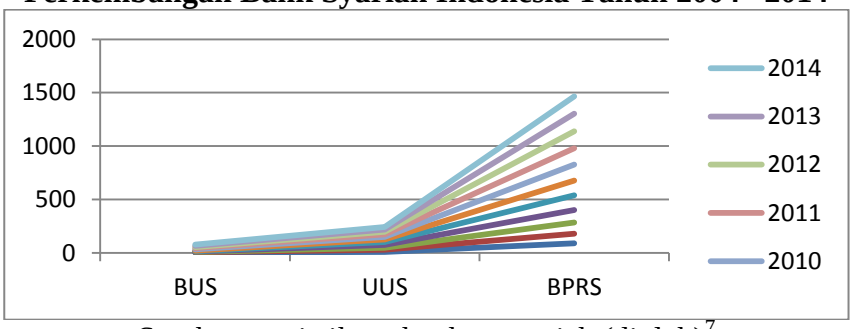

Sumber: statistik perbankan syariah (diolah)[7]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selanjutnya dapat dilihat dari informasi akuntansi, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain: *Rasio Perputaran Aktiva* (*Total Aset Turn Over*), rasio pembiayaan (*Financial to Deposite Ratio*) dan rasio kredit yang tercermin dalam pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*). Kemudian dibenturkan dengan faktor eksternal bank syariah yakni Inflasi dari tahun ke tahun.

[7]http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Okt%202014.pdf, diakses pada 10 Mei 2015

Financial to Deposite Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio pembiayaan akan menunjukan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga (*DPK*) yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan perbankan termasuk perbankan syariah. Dalam hal ini, penyaluran dana yang dimaksudkan adalah berupa pembiayaan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertivikat wadiah bank Indonesia.[8] Begitu pentingnya menyalurkan pembiayaan bagi bank syariah, maka sudah selayaknya apabila bank syariah mampu memperhatikan dan mengaplikasikan berbagai aspek dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat terlebih lagi ketika terjadi peningkatan inflasi akibat kebijakan pemerintah yang justru mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan dari unsur kehati-hatian tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermaslah (*Non Perfoming Finance*).

---

[8]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 196

Relatif besarnya resiko pada akad pembiayaan (utamanya *mudharabah dan musyarakah*) jelas akan mempengaruhi pembiayaan bermaslah (*Non Performing Finance*) pada bank syariah. Resiko yang biasa dihadapi oleh bank syariah dalam hal ini adalah terlambatnya pengembalian atau cicilan yang mungkin disebabkan karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah seperti omset usahanya yangmenurun, atau bisa jadi dikarenakan ada masalah keluarga dari nasabah debitur, danbisa karena suatu keadaan yang diluar kehendak manusia (bencana alam).

Penyebab resiko pembiayaan bisa juga dikarenakan mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai pada saat akan memberikan pembiayaan pada calon nasabah debiturnya maka harus benar-benar diterapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dapat dilihat melalui bagaimana bank mampu menunjukan tingkat kemampuannya dalam menyalurkan dana pihak ketiga dengan baik, bagaimana perputaran aktiva bank dalam memperoleh pendapatan dan bagaimana kebijakan yang diambil bank ketika terjadi inflasi.

Sampai tahun 2014, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 196.491 miliar. Pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) perbankan syariah mencapai kisaran angka Rp 207.121

miliar. Pertumbuhan tabungan mudharabah mencapai Rp 47.126 miliar yang merupakan proporsi terbesar pada triwulan ketiga tahun 2014. Sementara itu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri perbankan syariah dengan nominal mencapai Rp 64.980 miliar dan non UMKM mencapai Rp 131.511.

Grafik 1.3
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

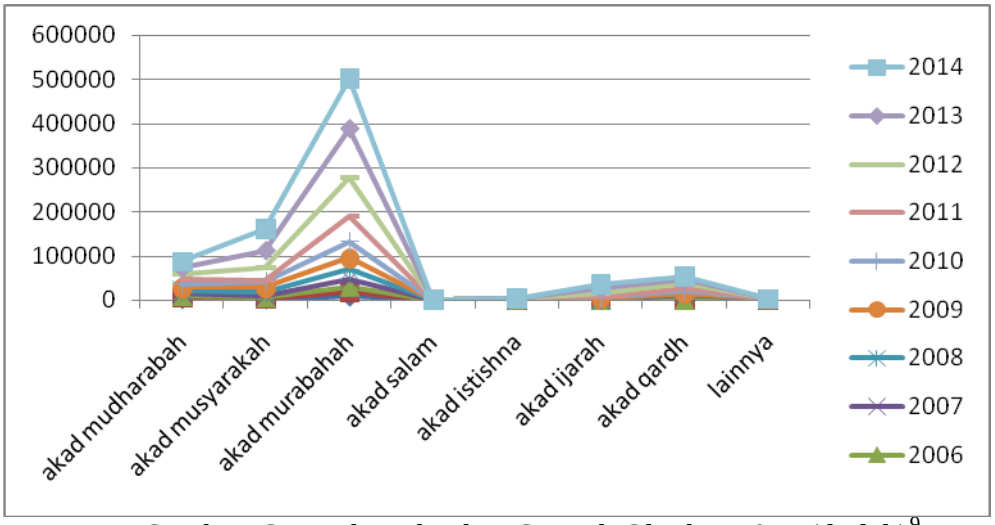

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Oktober 2014 (diolah)[9]

Pada Grafik 1.3 dapat dilihat gambaran umum komposisi pembiayaan Bank Syariah pasca krisis akibat bencana alam akhir tahun 2004. Pembiayaan dengan akad murabahah lebih banyak dilakukan oleh bank syariah karena memiliki tingkat risiko yang relatif kecil dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah. Bertambahnya nilai pembiayaan yang diberikan bank syariah pada tahun 2008 sebesar 22.486

[9]http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Okt%202014.pdf, diakses 10 Mei 2014

miliar rupiah dan semakin meningkat pada akhir tahun 2014 yakni sebesar 114.891 miliar rupiah maka dapat dipastikan bahwa Bank Syariah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal pembiayaan. Peningkatan tersebut patut diapresiasi namun perlu pula untuk diwaspadai karena apabila pemberian pembiayaan kurang memperhatikan unsur kehati-hatian maka dapat meningkatkan nilai rasio pembiayaan bermasalah bank syariah.

Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia terbesar selain Bank Muamalat yang patut dan layak untuk diperhitungkan adalah adalah Bank Syariah Mandiri. Sudah dapat dipastikan bahwa keberadaan Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pendorong pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah yang dinilai cukup baik.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga perbankan yang berdiri pada 8 September 1999 secara oprasional berubah berdasarkan prinsip syariah. Bermula dari empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, kemudian merger ditindak lanjuti dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system).* Dari sinilah bank yang mula-mula beroprasi secara konvensional setelah berubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. [10] Bank

[10] http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan-IV-2014.pdf. diakses 10 Mei 2015

syariah mandiri adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Grafik 1.4
Rasio Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

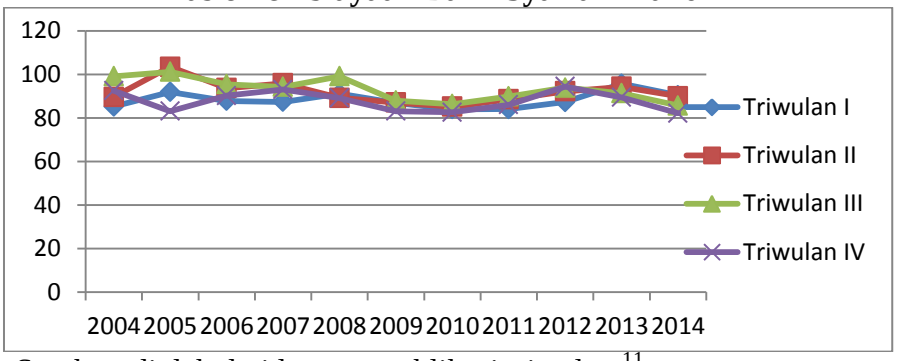

Sumber: diolah dari laporan publikasi triwulan [11]

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri dalam kurun waktu 2004-2014 telah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan baik dan tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh BI.

Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkannya kurang lebih 50% diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah.* Selain itu, fenomena yang terjadi di Bank Syariah Mandiri mengenai pendapatan bahwa pendapatan terbesarnya yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah.* Pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri akhir tahun 2014 memperoleh pendapatan sebesar 3.873.016 miliar rupiah, sedangkan untuk pembiayaan mudharabah memperoleh pendapatan sebesar Rp 420.136 juta dan pembiayaan musyarakah memperoleh pendapatan sebesar Rp 750.937 juta . Hal ini menunjukkan bahwa

[11] http://www.syariahmandiri.co.id, diakses 24 Juni 2015

pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*) di Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*).[12]

Hasil pemaparan diatas menjelaskan bahwa selayaknya Bank Syariah Mandiri patut untuk diteliti lebih jauh mengenai profil resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing)* yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. Sebab semakin tinggi pembiayaan bermaslah (*NPF*), semakin tinggi resiko yang dihadapi bank syariah, karena akan mempengaruhi permodalan bank syariah. Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk menguji lebih dalam mengenai pengaruh faktor external dan faktor internal untuk menekan pembiayaan bermaslah (*Non Perfoarming Financing*) pada PT Bank Syariah Mandiri.

Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, variabel likuiditas yaitu rasio pembiayaan *(FDR),* variabel kualitas aktiva diukur dengan rasio perputaran aktiva *(TATO*) dan variabel eksternal diukur melalui tingkat inflasi. Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah diukur menggunakan aktiva produktif yaitu *Non Performing Financing* untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki PT Bank Syariah Mandiri dalam pencegahan pembiayaan bermasalah dan penyelamatan kesehatan bank syariah karena *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia mempunyai fluktuasi sangat tinggi. Hasilnya disusun dalam bentuk penelitian dengan judul : **"Analisis Pengaruh Inflasi, Rasio Pembiayaan**

[12] http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan-IV-2014.pdf. diakses 10 Mei 2015

(Financing to Deposit Ratio) **dan Rasio Perputaran Aktiva** ***(Total Asset Turn Over)*** **Terhadap Pembiayaan Bermasalah** ***(Non Performing Financing)*** **Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2014".**

B. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?
2. Apakah rasio pembiayaan (*Financing to Deposit Ratio)* berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?
3. Apakah rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over)* berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?
4. Apakah inflasi, resiko pembiayaan *(Financing to Deposit Ratio)* dan rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over)* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia

2. Untuk menguji pengaruh rasio pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh rasio perputaran aktiva (*Total Asset Turn Over)* terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia
4. Untuk menguji pengaruh inflasi, rasio pembiayaan, dan rasio perputaran aktiva secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh adanya sebuah kontribusi/manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan pengaruh inflasi, rasio pembiayaan (*Financing to Deposit Ratio*), dan rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over)* terhadap pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesiadan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan (Bank Umum Syariah) untuk mengetahui tingkat potensi inflasi, rasio pembiayaan *(Financing to Deposit Ratio)*, rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over)* terhadap pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing*) PT Bank Syariah Mandiri Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2014, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dapat menambah refrensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perabankan Syariah.

3. Bagi Investor

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan berinvestasi di perbankan tersebut.

4. Bagi peneliti lain

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan Ayariah khususnya mengenai pengaruh inflasi, rasio pembiayaan *(Financing to Deposit Ratio)* dan rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over*) terhadap rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) PT Bank Syariah Mandiri Indonesia

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel inflasi, rasio pembiayaan *(Financing to Deposit Ratio*, dan rasio perputaran aktiva *(Total Asset Turn Over)* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia
2. Penelitiandibatasi pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia pada tahun 2004-2014.

F. Penegasan Istilah

a) Definisi Konseptual

1. Variabel dependen

Non Performing Financing (*NPF*) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.[13]

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Non Performing Financing (*NPF*), tingkat pengembalian cicilan dari nasabah akan mempengaruhi profitabilitas dan juga kinerja suatu bank. Sehingga bank diusahakan untuk menyeleksi para nasabahnya secara hati-hati untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Perbankan syariah ditekankan untk menyeleksi dalam pemenuhan persyaratan bank syariah.

2. Variabel Independen

   a) Inflasi

      Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling memengaruhi. Penggunaan inflasi digunakan untuk

[13] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm 98

mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.[14]

Inflasi =IHKN – IHK n-1 x 100 IHKn-1

Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi. Kecuali bila kenaikan satu harga barang mendorong kenaikan harga barang lain. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga..

b) Rasio Pembiayaan (*FDR*/*Financial to Deposit Ratio*)

Financing to Deposite Ratio sebagai pengukur rasio likuiditas mengarah pada aktivitas operasi perusahaan kemampuan untuk menghasilkan penjualan dari keuntungan penjualan produk dan jasa dan persyaratan serta ukuran modal kerja. Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan ini berarti pembatas manajemen untuk menghasilkan laba bahkan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar.[15]

Financing to Deposit Ratio = $\frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga (DPK).}}$ X100%

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya

[14] Julius A. Mulyadi, *Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 1988), hlm. 316

[15] John J Wild dkk, *Financial Statement*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm.186

likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *Financing to Deposit Ratio*, yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi commitmen loan, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank.

c) Rasio Perputaran Aset (*TATO*/*Total Asset Turn Over*)

Rasio yang menunjukan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan bank dalam mengelola sumber dana dalam menghasilkan pendapatan (revenue). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus:[16]

$$\textit{Total asset turn over} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Total asset turn over digunakan untuk mengetahui berapa kali banyaknya perputaran aktiva selama satu periode, sehingga dapat dilihat seberapa besar perputaran aktiva ini mampu menghasilkan penjualan atau pendapatan bagi bank syariah.

b) Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji pengaruh inflasi, rasio pembiayaan dan rasio perputaran aktiva terhadap rasio pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia peride 2004-2014

[16] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 159

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruanglingkup batasan penelitian, definisi operasional dan sistematika skripsi. Pada bab ini dijelaskan alasan-alasan mengapa peneliti mengambil judul dan apa tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian inflasi, pengertian rasio pembiayaan, rasio perputaran aktiva, pembiayaan bermasalah dan pengertian bank baik secara konvensional maupun syariah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail tentang analisis data dan interpretasi hasil penelitian di lapangan.

BAB V: Penutupan

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil penelitian dilapangan, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak bank maupun kepada pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.